

KEBIJAKAN PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI: PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Jimat Susilo

(Universitas Swadaya Gunung Jati)

jimat_cirebon@yahoo.com

Abstrak

Bahasa Indonesia lahir tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi mengemban fungsi yang lebih besar yaitu sebagai bahasa pemersatu bangsa. Negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dapat disatukan melalui bahasa Indonesia. Bahkan, bahasa Indonesia telah menunjukkan jati dirinya tidak hanya di lingkungan lokal, tetapi sudah merambah ke dunia global. Kurang lebih ada 42 negara di dunia yang sudah mempelajari bahasa Indonesia bahkan memasukkannya dalam kurikulum pendidikan. Begitu pesatnya perkembangan bahasa Indonesia yang mampu bersaing dengan bahasa-bahasa di dunia ini mengakibatkan terjadinya pengaruh bahasa-bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia.

Hal ini tidak bisa dipungkiri akibat arus globalisasi telah membawa perubahan dalam pemakaian bahasa. Sebuah akulturasi budaya, teknologi, ekonomi, dan politik ikut berperan mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia sehingga banyak ditemukan kosa kata bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia yang pemakaiannya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baik dilakukan secara lisan maupun tulisan.

Untuk menjaga pemertahanan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan agar pemakaian bahasa Indonesia tidak melenceng dari kaidahnya. Kebijakan ini tidak hanya mengatur pemakaian bahasa Indonesia di kalangan masyarakat, tetapi juga diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali para pejabat negara. Salah satu cara yang paling efektif untuk menjalankan kebijakan tersebut adalah melalui pendidikan. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi pengantar dalam dunia pendidikan. Melalui kebijakan pendidikan bahasa ini, diharapkan pemertahanan bahasa Indonesia akan semakin kokoh dan kuat meskipun arus globalisasi yang terus menggerus eksistensi bahasa Indonesia.

Kata Kunci: pendidikan, bahasa Indonesia, globalisasi, dan kebijakan.

Pendahuluan

Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara mengalami perjalanan yang cukup panjang. Bahasa Indonesia

secara resmi ada sejak diikarkannya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 oleh para pemuda Indonesia. Salah satu ikrar tersebut berbunyi “ Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa

persatuan bahasa Indonesia. Sejalan dengan perkembangannya, bahasa Indonesia akhirnya diangkat sebagai bahasa negara seperti yang dinyatakan dalam UUD 1945 Bab XV pasal 36 yang berbunyi “ Bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia.

Tonggak sejarah lahirnya bahasa Indonesia tersebut, dikupas lagi dalam Seminar Politik Bahasa Nasional di Jakarta pada tanggal 25 s.d. 28 Februari 1975. Dalam seminar tersebut menghasilkan rumusan yang menempatkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai:

- (1) bahasa resmi kenegaraan,
- (2) bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan,
- (3) bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan
- (4) bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengimplementasikan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara tersebut. Hal ini termaktub dalam UU No. 24 Tahun 2009 pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan. Selanjutnya, pada pembukaan Kongres Bahasa Indonesia X tanggal 28 - 31 Oktober 2013 di Jakarta, Nuh, Mendikbud RI, menyampaikan keinginannya agar peran

bahasa Indonesia di kancah global diperkuat dengan mengikuti peran Indonesia dalam bidang ekonomi dan politik yang masuk kelompok G-20 dan hendaknya juga diiringi peran dari aspek sosial dan budaya, termasuk di dalamnya bahasa Indonesia, yang saat ini termasuk bahasa dengan jumlah penutur keempat terbesar di dunia dan dipelajari di 45 negara.

Bagaimana peran bahasa Indonesia dalam pendidikan nasional? Dalam proses pendidikan, bahasa memegang peranan yang sangat penting. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun tulis. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa salah satu fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa pengantar pada dunia pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan yang berkaitan dengan bahasa harus dirumuskan secara komprehensif dan futuratif sehingga pelaksanaannya dapat secara optimal dan berkontribusi dalam terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Di samping itu juga, kebijakan pendidikan juga harus mengakomodasi penggunaan bahasa Indonesia secara proporsional.

Salah satu implementasi peran bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan yaitu dimasukkannya bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran inti dalam pendidikan di setiap satuan pendidikan. Pendidikan bahasa Indonesia sebagai wujud dalam menempatkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional dan bahasa Negara.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern telah mengubah paradigma tentang pendidikan bahasa Indonesia. Gelombang globalisasi telah mewarnai terjadinya perubahan sosial yang cukup menonjol. Salim (1990) mengungkapkan adanya empat kekuatan

yang berpengaruh dalam arus globalisasi, yaitu kekuatan bidang Iptek, ekonomi, lingkungan sosial, dan politik. Hal ini, juga tak terelakkan, arus globalisasi akan berpengaruh pada dunia pendidikan khususnya masalah identitas bangsa yang tercermin dalam sikap lebih mengutamakan penggunaan bahasa asing daripada penggunaan bahasa Indonesia (Muslich, 2010: 18). Dengan kata lain, sikap kedwibahasaan pengajaran bahasa tidak terhindarkan meskipun dalam pemakaiannya tergantung pada situasi dan kondisi. John E. Joseph (2004:348) dalam Tolkfson (1991) mengatakan bahwa pengajaran bahasa bersifat politis selalu melibatkan dua bahasa yang memiliki perbedaan budaya pada umumnya dan penggunaannya sesuai dalam situasi tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, muncul suatu permasalahan bagaimanakah implikasi era globalisasi terhadap pendidikan bahasa Indonesia, dan bagaimanakah bentuk kebijakan pendidikan bahasa dalam menghadapi era globalisasi tersebut?

Pendidikan Bahasa Indonesia dalam Tujuan Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Crow (dalam Supriyatno, 2001) mengatakan bahwa pendidikan diinterpretasikan dengan makna untuk mempertahankan individu dengan kebutuhan-kebutuhan yang senantiasa bertambah dan merupakan suatu harapan untuk dapat mengembangkan diri agar berhasil serta untuk memperluas, mengintensifkan ilmu pengetahuan dan memahami elemen-elemen yang ada

disekitarnya. Sejalan dengan yang disampaikan Richards & Schmidt (2002: 174) bahwa pendidikan adalah proses belajar mengajar baik formal maupun nonformal dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan, tingkah laku, serta pemahaman pada area tertentu.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional (pasal 1 ayat 1) disebutkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Selanjutnya, dalam pasal 3 dijelaskan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sejalan dengan pengertian pendidikan dan tujuan pendidikan nasional, *bagaimanakah peran pendidikan bahasa Indonesia dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut?*

Pepatah mengatakan “ bahasa menunjukkan bangsa”, artinya bahwa dengan bahasa dapat menunjukkan identitas atau jati diri bangsa. Tanpa bahasa maka tidak ada negara. Begitu pentingnya bahasa dalam sebuah negara. Demikian halnya dengan bahasa Indonesia. Salah satu fungsi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah dijadikan sebagai bahasa resmi pengantar dalam dunia pendidikan. Alwi (2003: 9) menyatakan

bahwa pendidikan bahasa Indonesia melalui sistem persekolahan dilakukan dengan mempertimbangkan bahasa sebagai satu keseluruhan berdasarkan konteks pemakaian yang ditujukan untuk peningkatan mutu penguasaan dan pemakaian bahasa yang baik dengan tidak mengabaikan adanya berbagai ragam bahasa Indonesia yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, Alwi (2003) memberikan pernyataan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, perlu dilakukan peningkatan mutu pendidikan bahasa Indonesia dengan cara:

- (1) pengembangan kurikulum bahasa Indonesia;
- (2) Pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan metodologi pengajaran bahasa;
- (3) Pengembangan tenaga kependidikan kebahasaan yang profesional;
- (4) Pengembangan sarana pendidikan bahasa yang memadai, terutama sarana uji kemahiran bahasa.

Permasalahan yang dihadapi dalam pendidikan bahasa Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah belum terjangkaunya pendidikan bahasa Indonesia ke pelosok-pelosok nusantara. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum bisa berbahasa Indonesia secara aktif. Untuk itu, diperlukan upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia seperti yang disampaikan Alwi (2003: 12) bahwa pemasyarakatan bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan cara:

- (1) penentuan prioritas kelompok sasaran;
- (2) pengembangan bahan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran;
- (3) pemanfaatan teknologi informasi dengan sebaaik-baiknya;

- (4) peningkatan kerja sama dengan semua pihak yang dapat memperlancar pemasyarakatan bahasa Indonesia di Indonesia;

- (5) peningkatan mutu tenaga pemasyarakatan;

- (6) Pemanfaatan sarana uji kemahiran berbahasa Indonesia.

Dari uraian tersebut, terlihat banyak unsur atau pihak yang terlibat dalam pendidikan bahasa Indonesia untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sumber daya manusia, lembaga pemerintahan, sarana prasarana, dan pemanfaatan teknologi merupakan unsur-unsur yang dapat membantu terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Jika pendidikan bahasa Indonesia sudah dilakukan secara menyeluruh di Indonesia dengan baik, tidak pelak lagi tujuan pendidikan nasional akan terwujud.

Pendidikan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi

Globalisasi adalah kata yang digunakan untuk melambangkan suatu realitas global yang menekankan hidup dalam konseptual lingkungan yang baru, yang ditandai dengan teknologi informasi. Globalisasi dapat dipahami sebagai kekuatan yang melancarkan sejumlah tekanan pada standar dan membuat tuntutan dalam semua masyarakat (Javis 2007 dalam Chaterine Chua Siew Kheng Dan Richard B. Baldauf Jr, 2011: 971). Dengan demikian, globalisasi terdiri dari proses sosial multidimensi yang saling ketergantungan sosial di seluruh dunia intensitas, menciptakan hubungan yang lebih dalam antara orang-orang dari seluruh dunia (Steger, 2003).

Pengaruh eksternal seperti tuntutan ekonomi juga memainkan peran penting dalam mempromosikan jenis bahasa yang

dipelajari dan standar bahwa pengguna harus dicapai. Misalnya, meskipun bahasa Inggris telah menjadi bahasa populer untuk dipelajari karena dari keuntungan ekonomi, sosial, teknologi dan pendidikannya (Graddol, 2006).

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Chaterine Chua Siew Kheng dan Richard B. Baldauf Jr (2011: 972) bahwa keterlibatan bahasa dalam perencanaan global oleh pemerintah juga dapat terjadi di tingkat negara bagian atau kabupaten. Misalnya, di Singapura pada tahun 1965, pemerintah Singapura memutuskan bahwa bahasa Inggris dijadikan sebagai salah satu bahasa resmi negara dan yang disederhanakan daripada karakter tradisional yang akan digunakan untuk instruksi bahasa ibu Cina di sekolah-sekolah Singapura, meskipun mereka hanya bisa diperkenalkan selanjutnya.

Leclerc (1994: 1994 - 2007) dan Polsky (2009) memberikan contoh negara-negara yang mendudukan bahasa sebagai suatu hal yang harus dipelajari oleh warga negaranya. Denmark dan Eslandia mewajibkan warga asing yang tinggal di negara tersebut belajar bahasa Denmark dan Eslandia. Mexico mengharuskan semua pengumuman publik menggunakan bahasa Spanyol. Belanda mewajibkan semua urusan administratif menggunakan bahasa Belanda.

Berdasarkan contoh-contoh di negara barat tersebut, *bagaimanakah dengan kondisi bangsa Indonesia?* Sejarah telah mencatat, bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada Konggres Pemuda 28 Oktober 1928 di Solo. Ikrar yang diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia ini memperlihatkan betapa pentingnya bahasa bagi suatu bangsa.

Tanpa bahasa, bangsa tidak akan berkembang, tidak mampu menggambarkan dan menunjukkan dirinya secara utuh dalam dunia pergaulan dengan dunia lain. Hampir dasa windu bahasa Indonesia memperlihatkan ciri-cirinya sebagai alat komunikasi yang mutlak diperlukan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah membuktikan diri sebagai bahasa yang tahan uji. Dalam mengemban misinya, bahasa Indonesia terus berkembang seiring dengan keperluan dan perkembangan bangsa Indonesia, walaupun ada perkembangan yang bersifat positif dan negatif. Perkembangan ini terjadi karena perkembangan masyarakat yang semakin dinamis dan modern. Gejala inilah yang disebut era globalisasi.

Fattah (2012: 139) menyatakan bahwa globalisasi dapat digambarkan sebagai perangkat proses dengan berbagai cara:ekonomi, budaya, dan politik membuat keterhubungan antarberbagai negara. Terdapat dua aspek yang berhubungan dengan globalisasi yaitu, 1) terkait dengan fakta proses dan komunikasi transnasional, 2) meningkatnya kesadaran tentang realitas hidup.

Water dalam Fattah (2012: 140) merumuskan globalisasi merupakan proses sosial di mana hambatan geografis pada sosial dan budaya menjadi kecil dan orang-orang menyadari bahwa mereka kecil. Dengan adanya globalisasi, wilayah atau teritorial sangat penting. Lebih lanjut, Amer (2002: 20) menyatakan “ *Increasing the contact between people across national boundaries-in economy, in technology in cultural, and in governance. But it is also fragmenting production processes, labour markets, political entities and societies. So while globalization has positive, innovative, dynamic aspect-it also has negative,*

marginalizing aspects (globalisasi terjadi karena hubungan antarmanusia yang melewati batas negara dalam bidang ekonomi, teknologi, budaya, pemerintahan, selain juga proses produksi, pasar tenaga kerja, lembaga politik dan sosial. Sebagai sebuah fenomena globalisasi memiliki sisi positif dan sisi negatif).

Derasnya arus globalisasi di dalam kehidupan akan berdampak pula pada perkembangan dan pertumbuhan bahasa sebagai sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep-konsep dan istilah baru di dalam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) secara tidak langsung memperkaya khasanah bahasa Indonesia. Dengan demikian, semua produk budaya akan tumbuh dan berkembang pula sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, termasuk bahasa Indonesia, yang dalam itu, sekaligus berperan sebagai prasarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan iptek itu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, muncul permasalahan *bagaimakah pendidikan bahasa Indonesia dalam era globalisasi?* Pendidikan bahasa Indonesia saat ini di tengah-tengah arus globalisasi telah membuktikan jati dirinya. Namun perlu disadari bahwa adanya pengaruh baik dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya akan mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Indonesia menjadi ciri budaya bangsa Indonesia yang dapat diandalkan di tengah-tengah pergaulan antarbangsa pada era globalisasi ini. Akibat pergaulan antarbangsa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan memengaruhi kosa kata bahasa Indonesia.

Banyak istilah-istilah asing yang akan diserap ke dalam bahasa Indonesia.

Penggunaan bahasa di dunia maya, internet, *facebook* misalnya, memberi banyak perubahan bagi struktur bahasa Indonesia yang oleh beberapa pihak disinyalir merusak bahasa itu sendiri. Berlandaskan alasan globalisasi dan prestise, masyarakat mulai kehilangan rasa bangga menggunakan bahasa nasional. Tidak hanya pada rakyat kecil, 'krisis bahasa' juga ditemukan pada para pejabat negara. Kurang intelek katanya jika dalam setiap ucapan tidak dibumbui selingan bahasa asing yang sebenarnya tidak perlu. Hal tersebut memunculkan istilah baru, yaitu 'Indoglish' kependekan dari 'Indonesian-English' untuk fenomena bahasa yang kian menghantam bahasa Indonesia. Sulit dipungkiri memang, bahasa asing kini telah menjamur penggunaannya. Mulai dari judul film, judul buku, judul lagu, sampai pemberian nama merk produk dalam negeri. Kita pun merasa lebih bangga jika lancar dalam berbicara bahasa asing. Namun, apapun alasannya, entah itu menjaga prestise, mengikuti perkembangan zaman, ataupun untuk meraup keuntungan, tanpa kita sadari secara perlahan kita telah ikut andil dalam mengikis kepribadian dan jati diri bangsa kita sendiri.

Sekarang ini penggunaan bentuk 'Inggris' sudah banyak menggejala. Dalam bidang internet dan komputer kita banyak menggunakan kata *mendownload*, *mengupload*, *mengupdate*, *dienter*, *direlease*, *didiscount*, dan lain sebagainya. Tidak hanya dalam bidang komputer saja, di bidang lain pun sering kita jumpai. Selain bahasa Asing, kedudukan bahasa Indonesia juga semakin terdesak dengan pemakaian bahasa-bahasa gaul di kalangan remaja. Bahasa gaul ini sering kita temukan

dalam pesan singkat atau sms, *chatting*, dan sejenisnya. Misalnya dalam kalimat '*gue gitu loh..pa sich yg ga bs*' dalam kalimat tersebut penggunaan kata ganti aku tidak dipakai lagi.

Globalisasi memang tidak dapat dihindari. Akulturasi bahasa nasional dengan bahasa dunia pun menjadi lebih terasa perannya. Menguasai bahasa dunia dinilai sangat penting agar dapat bertahan di era modern ini. Namun sangat disayangkan jika masyarakat menelan mentah-mentah setiap istilah-istilah asing yang masuk dalam bahasa Indonesia. Ada baiknya jika dipikirkan dulu penggunaannya yang tepat dalam setiap konteks kalimat. Sehingga penyusupan istilah-istilah tersebut tidak terlalu merusak tatanan bahasa nasional.

Fenomena di atas dapat mengakibatkan pergeseran bahasa Indonesia. Fenomena pemertahanan dan pergeseran bahasa sebenarnya telah ada sejak bahasa-bahasa itu mulai mengadakan kontak dengan bahasa lainnya (Grosjean, 1982). Kontak antardua suku atau suku bangsa yang masing-masing membawa bahasanya sendiri-sendiri lambat laun mengakibatkan terjadinya persaingan kebahasaan. Pada umumnya, di dalam persaingan kebahasaan terjadi fenomena-fenomena kebahasaan yang diawali dengan kedwibahasaan, diglosia, alih kode/campur kode, interferensi, dan akhirnya permertahanan dan pergeseran bahasa.

Ada banyak faktor yang menyebabkan pergeseran dan kepunahan suatu bahasa. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan di berbagai tempat di dunia, faktor-faktor tersebut seperti loyalitas bahasa, konsentrasi wilayah pemukiman penutur, pemakaian bahasa pada ranah tradisional sehari-hari, kesinambungan

peralihan bahasa-ibu antargenerasi, pola-pola kedwibahasaan, mobilitas sosial, sikap bahasa dan lain-lain. Romaine (1989) mengatakan bahwa faktor-faktor itu juga dapat berupa kekuatan kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas, kelas sosial, latar belakang agama dan pendidikan, hubungan dengan tanah leluhur atau asal, tingkat kemiripan antara bahasa mayoritas dengan bahasa minoritas, sikap kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas, perkawinan campur, kebijakan politik pemerintah terhadap bahasa dan pendidikan kelompok minoritas, serta pola pemakaian bahasa.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, perlu dilakukan pembinaan bahasa melalui pendidikan bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan dilakukan dengan adanya perubahan kurikulum yang menempatkan pendidikan bahasa disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dunia pendidikan yang syarat pembelajaran dengan media bahasa menjadikan bahasa sebagai alat komunikasi yang primer. Sejalan dengan hal tersebut, bahasa baku merupakan simbol dalam dunia pendidikan dan cendekiawan. Penguasaan Bahasa Indonesia yang maksimal dapat dicapai jika fondasinya diletakkan dengan kokoh di rumah dan di sekolah mulai TK (Taman Kanak-kanak) sampai PT (Perguruan Tinggi). Rusyana (1984:152) menyatakan bahwa dalam membina masyarakat akademik, penggunaan bahasa yang tidak baik dan tidak benar akan menimbulkan masalah. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dianggap mempunyai peranan dalam menuju arah pembangunan masyarakat akademik idaman.

Di samping itu juga perlu ditanamkan sikap disiplin dalam pemakaian bahasa Indonesia. Sikap disiplin ini seperti yang dituangkan dalam UU No. 24 Tahun 2009 pasal 41 ayat (1) bahwa pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman.

Tantangan Pendidikan Bahasa Indonesia di era globalisasi

Fenomena yang terjadi dalam pergeseran bahasa Indonesia sebagai akibat gelombang arus globalisasi ini tentu menjadi tanggung jawab semua pihak dalam mempertahankan eksistensi atau jati diri bahasa Indonesia di mata dunia internasional. Salah satu cara untuk mempertahankan bahasa Indonesia dari berbagai tantangan yang di era globalisasi ini adalah melalui pendidikan bahasa Indonesia. Peran guru, khususnya guru bahasa Indonesia, sangat diperlukan dalam menjaga atau mempertahankan bahasa dari pergeseran bahkan sampai punahnya bahasa.

Muslich (2010: 67 - 70) memberikan gambaran peranan guru dalam pendidikan bahasa Indonesia, yaitu *pertama*, guru sebagai pembimbing artinya guru harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang anak didiknya tentang bahasa yang digunakan peserta didik; *kedua*, guru sebagai model artinya guru harus memberi contoh kepada peserta didik dalam menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar; *ketiga*, guru sebagai administrator artinya guru harus dapat mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan bahasa Indonesia; *keempat*, guru sebagai inovator

artinya guru hendaknya selalu mengikuti perkembangan bahasa dan kreatif selalu memberikan dorongan kepada siswa untuk terampil berbahasa Indonesia; *kelima*, guru sebagai evaluator artinya guru harus terampil membuat alat evaluasi yang tepat yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh siswanya.

Peran guru tersebut tidak akan tercapai dengan baik apabila tidak didukung oleh berbagai pihak, di antaranya keluarga, masyarakat, bahkan sampai pada para pemimpin bangsa. Semuanya harus bersama-sama mempunyai sikap berbahasa Indonesia sebagai identitas atau jati diri bangsa. Tanpa adanya kerja sama semua pihak dalam melestarikan bahasa Indonesia dari pengaruh globalisasi, usaha untuk mempertahankan bahasa Indonesia tersebut akan mengalami kegagalan. Untuk itulah diperlukan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah untuk mempertahankan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa.

Kebijakan Pendidikan Bahasa Indonesia

Fishman et al. (1971: 293) dalam Kumaran Rajandran (2008: 237) mengatakan bahwa: *language policy as the decisions taken by constituted organizations with respect to the functional allocation of codes within a speech community*. Kebijakan bahasa sebagai keputusan yang diambil oleh organisasi dibentuk sehubungan dengan alokasi fungsional kode dalam masyarakat tutur . Forough Rahimi (2011:143-148) menjelaskan kebijakan bahasa Spolsky yang digambarkan melalui tiga serangkai jalinan konsep yaitu , *'language practices'* (praktik bahasa, yaitu cara berbagai linguistik biasanya dipilih dalam suatu masyarakat) , *'language ideology and*

beliefs' (ideologi bahasa dan keyakinan tentang bahasa dan penggunaannya), dan *'language management and planning'* (manajemen dan perencanaan bahasa).

Chaer & Agustina (2010: 177) mengatakan bahwa kebijakan bahasa merupakan satu pegangan yang bersifat nasional, untuk kemudian membuat perencanaan bagaimana cara membina dan mengembangkan satu bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang dapat digunakan secara tepat di seluruh negara, dan dapat diterima oleh segenap warga secara lingual, etnis, dan kultur berbeda.

Shohamy (2006: 45) memberikan pengertian kebijakan bahasa atau *language planing* yaitu mekanisme utama dalam menyusun, mengatur, dan memanipulasi perilaku kebahasaan karena kebijakan bahasa terdiri atas keputusan dalam pembuatan bahasa dan penggunaannya dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian kebijakan tersebut, dalam kebijakan dapat mengacu pada proses pembuatan landasan atau pijakan yang mendasar dalam suatu pemerintahan, organisasi, instansi ataupun perseorangan, mencapai tujuan atau sasaran. Hal ini tidak terkecuali dengan kebijakan bahasa Indonesia.

Kebijakan dalam pendidikan bahasa Indonesia di Indonesia dapat dilihat beberapa keputusan yang diambil bangsa Indonesia dan dokumen-dokumen seperti berikut.

- 1) Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928
Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Para Pemuda mendeklarasikan sumpahnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Salah satu ikrar tersebut berbunyi:

KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENDJOENJOENG BAHASA PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA

Ikrar ini mempunyai makna yang mendalam ditinjau dari perspektif semantik. Para pemuda Indonesia tidak hanya “mengakoe”, bahkan “mendjoenjoeng” bahasa persatuan, bahasa Indonesia yang diangkat dari bahasa daerah yaitu bahasa Melayu.

- 2) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Dalam UUD 1945 Bab XV pasal 36 disebutkan bahwa *Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia*. Salah satu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara adalah sebagai bahasa resmi pengantar dalam lembaga pendidikan.
- 3) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan masalah bahasa Indonesia diatur pada Bab VII Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Pasal 37 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi wajib memuat bahasa.
- 4) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Bagian undang - undang yang berkaitan dengan bahasa terdapat pada Bab dan pasal berikut.
 - (a) Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (b) Bab III Pasal 25 menyebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Selain itu, bahasa Indonesia juga sebagai bahasa resmi negara yang berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.
- (c) Pasal 26-39 mengatur penggunaan bahasa Indonesia yang selanjutnya pada pasal 40 disebutkan ketentuannya diatur dalam Peraturan Presiden.
- (d) Pasal 40 dan 43 mengatur Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia.
- (e) Pasal 44 mengatur Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional.
- (f) Pasal 45 mengatur Lembaga Kebahasaan.
- 5) Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 40 UU No. 24 Tahun 2009. Perpres ini terdiri atas 3 Bab dan 17 pasal yang mengatur pidato resmi pejabat negara di luar negeri dan di dalam negeri baik pada forum internasional maupun forum nasional.

Dari beberapa kebijakan bahasa yang telah diputuskan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam pendidikan bahasa Indonesia. Implementasi kebijakan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan sebagai wujud fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi pengantar dalam lembaga-lembaga pendidikan. Jika semua kebijakan yang telah diputuskan tersebut dapat dilaksanakan oleh semua elemen masyarakat secara disiplin dan konsisten, pengaruh globalisasi terhadap bahasa Indonesia dapat tidak akan merusak eksistensi bahasa Indonesia.

Penutup

Berdasarkan uraian di depan dapat diambil beberapa simpulan seperti berikut.

1. Bahasa Indonesia telah menunjukkan jati dirinya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara sehingga mampu menunjukkan identitasnya sebagai alat komunikasi dan berinteraksi dalam ruang lingkup lokal maupun global.
2. Era globalisasi telah membawa perubahan dalam pemakaian bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing bersama-sama dengan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi tidak terelakkan. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya kedwibahasaan. Untuk mempertahankan eksistensi pemakaian bahasa Indonesia, diperlukan adanya pendidikan bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan mulai tingkat bawah hingga tingkat atas. Peran guru, masyarakat, dan pemerintah sangat diperlukan dalam pendidikan bahasa Indonesia ini. Pentingnya pendidikan bahasa Indonesia ini sebagai bentuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang

komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Insan Indonesia cerdas diwujudkan melalui proses pendidikan baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat.

3. Salah satu bentuk pendidikan bahasa Indonesia yaitu bahasa Indonesia ditempatkan sebagai salah satu mata pelajaran inti dalam pendidikan di setiap satuan pendidikan. Hal ini bahasa Indonesia memegang peranan sentral dalam dunia pendidikan sebagai Bahasa Nasional dan bahasa Negara.
4. Dalam mempertahankan pemakaian bahasa Indonesia sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dari pengaruh globalisasi, diperlukan kebijakan-kebijakan bahasa Indonesia. Kebijakan ini merupakan pijakan atau keputusan oleh lembaga atau organisasi yang dijadikan sebagai pedoman tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran.

Daftar Pustaka

Alwi, Hasan. 2003. *Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.

Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 2010. *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta dalam Andini, Dewi. 2013. *Menerapkan Kebijakan Bahasa*.
<http://andinijs.blogspot.com/2013/11/menerapkan-kebijakan-bahasa.html>
diunduh 19 Oktober 2014.

Fattah, Nanang. 2012. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.

Groesjean, Francois. 1982. *Life with Two Languages*. Cambridge: Harvard University Press.

Hinkel, Eli. 2011. *Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. Volume II*. New York: Routledge.

Leclerc, Jaques. 1994. *Recueil des législations linguistiques dans le monde*, Quebec, Canada : Centre internationale de recherche en aménagement linguistique.

Muslich, Masnur. 2010. *Bahasa Indonesia pada Era Globalisasi: Kedudukan, Fungsi, Pembinaan, dan Pengembangan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rajandran, Kumaran. 2008. "Language planning for the Malay language in Malaysia since independence" dalam *Iranian Journal of Language Studies (IJLS)*, Vol. 2(2), 2008 (p. 237-248).

Richards, Jack C. & Schmidt, Richard. (2002). *Longman dictionary of language teaching and applied linguistics*. Edinburg: Pearson Education Limited.

Romaine, Suzanne. 1989 *Bilingualism*. Oxford: Basil Blackwell.

Rusyana, Yus. 1984. *Bahasa dan Sastra dalam Gamitan Pendidikan: Himpunan Bahasan*. Penerbit: Diponegoro.

Salim, Emil. 1990. "Pembekalan Kemampuan Intelektual untuk Menjauhkan Gelombang Globalisasi. Dalam Seminar Pendidikan, Th. IX/4. Bandung: University Press IKIP Bandung.

Slamet, St. Y. 2014. *Problematika Berbahasa Indonesia dan Pembelajarannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Shohamy, Elana. (2006). *Language policy hidden agendas and new approaches*. New York: Routledge.

Spolsky, Bernard. (2009). *Language management*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tolkfson, J.W. 1991. *Planing Language, Planing Inequlity: Language Policy in Cpmmunity*. New York: Lougman.